BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Komunikasi kebijakan *E-Procurement* dalam pelayannan pengadaan barang dan jasa pada lembaga layanan secara elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat. Tidak efektif, hal ini terlihat adanya *miss communication* akibat kesalahan pada penyampaian pesan dan penerimaan pesan oleh bawahan LPSE ataupun peserta tender.
2. Sumber daya kebijakan *E-Procurement* dalam pelayannan pengadaan barang dan jasa pada lembaga layanan secara elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat kurang optimal hai ini ditandai dengan belum terbentuknya pola evaluasi pelaporan dan pengawasan yang belum menjamin kontinitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
3. Disposisi kebijakan *E-Procurement* dalam pelayannan pengadaan barang dan jasa pada lembaga layanan secara elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat masih jauh dari harapan hai ini terlihat pada minimnya disposisi pada perusahaan barang dan jasa.
4. Struktur organisasi kebijakan *E-Procurement* dalam pelayannan pengadaan barang dan jasa pada lembaga layanan secara elektronik

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(LPSE) di Provinsi Jawa Barat masih belum sinkron. Hal ini, terlhat dari adanya penyimpangan mulai dari pengumuman tender sampai pemenang tender.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saransaran sebagai berikut :

1. Diharapkan LPSE agar membenahi pola komunikasi dengan melakukan pembeharuan sisitem komunikasi kebijakan, baik itu pola komunikasi kebijakan dengan peserta tender, masyarakat, antar lembaga pemerintah ataupun antar pegawai di lingkungan LPSE Provinsi Jawa Barat.
2. Pada upaya peningkatan sumber daya manusia, LPSE agar melakukan pelatihan/bimbingan teknik secara kontinu dalam meningkatkan kompetensi pegawai LPSE Provinsi Jawa Barat.
3. LPSE agar lebih berhati-hati dalam faktor disposisi yang meliputi, pengangkatan birokrasi dan insentif pada pegawai LPSE Provinsi Jawa Barat.
4. Diperlukan SOP yang lebih kompleks dan dapat memberikan kejelasan terhadap beberapa aktivitas kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan LPSE.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional